

PELATIHAN PARALEGAL DESA DEME DUA DAN DESA BUBALANGO KECAMATAN SUMALATA (OPTIMALISASI PERAN PARALEGAL DI TINGKAT DESA YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS)

Nurmin K. Martam¹, Yayan Hanapi²
Universitas Gorontalo
e-mail : yayanhanapi@gmail.com

ABSTRAK

Paralegal di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung akses keadilan. Namun, tantangan dalam kualitas dan kompetensi memerlukan solusi yang menyeluruh. Strategi pelatihan berkelanjutan, regulasi yang mendukung, dan pemanfaatan teknologi adalah langkah penting untuk memastikan layanan paralegal lebih profesional, berkualitas, dan berintegritas. Paralegal memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan di tingkat desa. Namun, peran mereka belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan dukungan regulasi. Melalui kolaborasi berbagai pihak, optimalisasi peran paralegal di desa dapat terwujud, mendukung keadilan yang lebih merata dan inklusif. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas paralegal dalam menjalankan peran mereka di komunitas desa. Sistem pengawasan berbasis umpan balik masyarakat, supervisi oleh lembaga bantuan hukum, pelaporan berkala, penegakan kode etik, serta pelatihan tentang integritas dan etika profesional merupakan elemen yang harus diterapkan. Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum diharapkan menyediakan sumber daya dan pelatihan rutin untuk paralegal, Masyarakat dan Aparat Desa perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran paralegal dan mendukung mereka dalam menjalankan tugas, serta Pengembangan Sistem Monitoring berbasis teknologi harus diprioritaskan untuk memperluas akses informasi dan pengawasan kinerja paralegal. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum harus membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi kinerja paralegal, Masyarakat perlu diberdayakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif terkait kinerja paralegal guna menciptakan pengawasan yang partisipatif, Supervisi yang dilakukan oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum harus lebih intensif, terutama untuk kasus-kasus yang rumit dan berisiko tinggi.

Kata kunci : Peran Palegal, Berkualitas, Berintegritas

ABSTRACT

Paralegals at the village level have a strategic role in supporting access to justice. However, challenges in quality and competence require a comprehensive solution. Ongoing training strategies, supportive regulations, and the use of technology are important steps to ensure paralegal services are more professional, qualified, and with integrity. Paralegals have an important role in providing access to justice at the village level. However, their role has not been optimal due to limited capacity and regulatory support. Through the collaboration of various parties, the optimization of the role of paralegals in villages can be realized, supporting more equitable and inclusive justice. Effective monitoring and coaching mechanisms are essential to ensure the integrity of paralegals in carrying out their roles in village communities. A monitoring system based on community feedback, supervision by legal aid agencies, periodic reporting, code of ethics enforcement, and training on professional integrity and ethics are elements that must be implemented. The government and Legal Aid Institutions are expected to provide resources and regular training for paralegals, communities and village officials need to raise awareness about the importance of the role of paralegals and support them in

carrying out their duties, and the development of technology-based Monitoring Systems should be prioritized to expand access to information and supervision of paralegal performance. The government and legal aid institutions must build a technology-based monitoring system to facilitate reporting and evaluation of paralegal performance, The community needs to be empowered to provide constructive feedback related to paralegal performance to create participatory supervision, Supervision carried out by lawyers or legal aid institutions must be more intensive, especially for complex and high-risk cases.

Keywords : *Role of Illegal, Quality, Integri*

1. PENDAHULUAN

Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum di wilayah pedesaan masih menjadi masalah besar dalam menciptakan keadilan sosial yang merata. "Masyarakat di pedesaan sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan karena kurangnya akses ke pengacara dan institusi hukum," kata Laoly (2020). Hambatan ini mencakup lokasi yang jauh dari kantor hukum dan minimnya informasi tentang proses hukum yang tersedia¹.

Paralegal berperan penting sebagai penyambung antara masyarakat dan sistem hukum formal. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, "Paralegal adalah individu yang memiliki pelatihan atau pengalaman dalam membantu pelaksanaan bantuan hukum." Peran ini sangat krusial dalam memberikan edukasi hukum dan mendampingi warga desa dalam permasalahan sehari-hari².

Paralegal adalah orang-orang yang secara resmi telah mengikuti pelatihan khusus tentang hokum sehingga paralegal dapat melakukan pengaduan ataupun penuntutan kepada pihak yang melakukan penyelewengan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum didalam Pasal 1 ayat (1) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan dalam ayat (3) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi

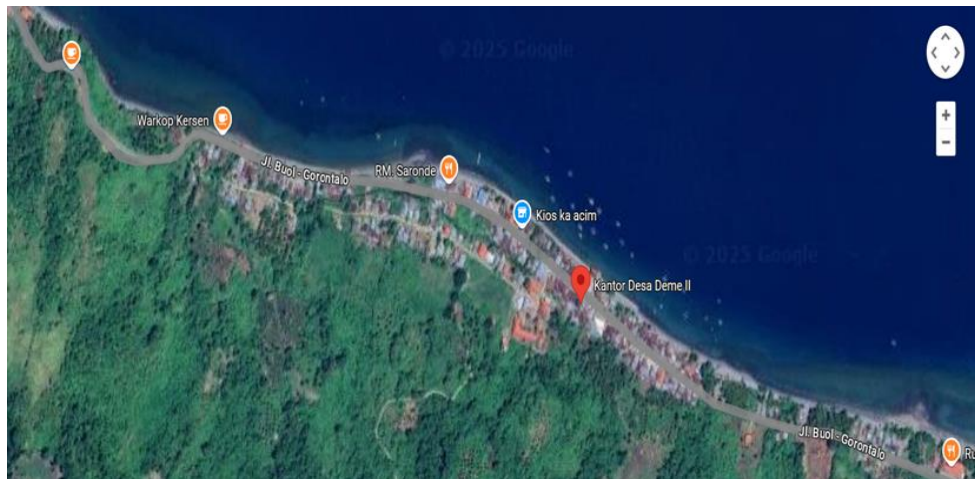
2. MASALAH

- 2.1** Bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi paralegal di tingkat desa untuk mendukung akses keadilan bagi masyarakat?
- 2.2** Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dapat memastikan integritas paralegal dalam menjalankan perannya di komunitas desa?

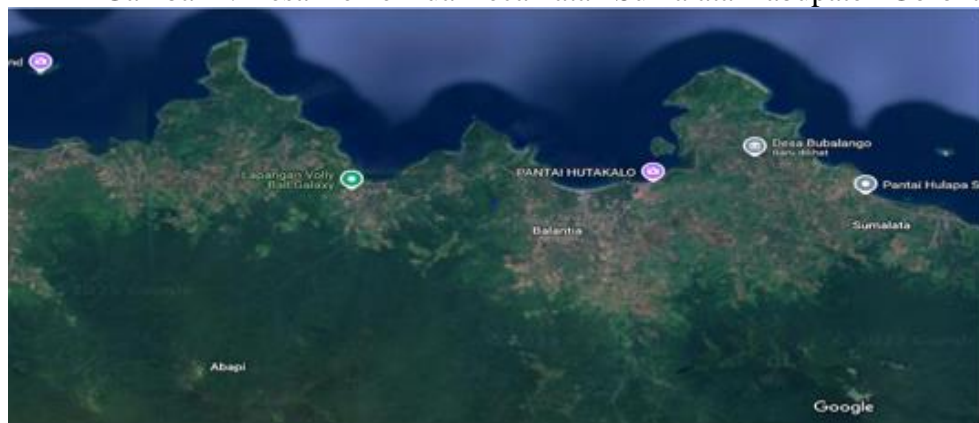
3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas (*Community-Based Participatory Research*). Jenis pengabdian yang dilaksanakan adalah penguatan kapasitas paralegal di tingkat desa melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan modul hukum praktis. Pendekatan ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan³ Arifin (2022), "Pengabdian berbasis partisipasi masyarakat memungkinkan terciptanya kolaborasi yang efektif untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik.

Bagan Roadmap Pengabdian:



Gambar 1. Desa Deme Dua Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo



Gambar 2. Desa Bupalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Memberikan pelatihan hukum praktis dan etika profesional bagi paralegal, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum., 3. Pendampingan : Paralegal didampingi dalam menjalankan perannya di masyarakat untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum, serta 4. Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan kualitas layanan dan tingkat kepuasan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bubalango dan Desa Deme Dua

Desa Bubalango memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan sosial budaya masyarakat setempat. Nama "Bubalango" berasal dari bahasa lokal yang berarti "tempat yang tinggi dan subur." Desa ini resmi didirikan pada tahun 1980 setelah pemekaran dari wilayah desa induknya. Perkembangan Desa Bubalango dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari daerah pesisir yang mencari lahan pertanian di dataran tinggi yang lebih subur. Desa ini menjadi salah satu pusat pertanian dan perikanan yang strategis di Kecamatan Sumalata Timur.

Desa Deme Dua Merupakan Salah Satu Desa Dari Sepuluh (10) Desa Yang Ada Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Deme Dua Terdiri Dari Tiga (3) Dusun Yakni Dusun Tamentao, Tengah, Dan Pongayoman. Desa Deme Dua Berdiri Pada Tahun 1826 Dengan Nama Deme Atau Huntungo, Yang Berasal Dari Bahasa Gorontalo Yang Artinya Betah (Bermukim Sementara). Yang Waktu Itu Kepala Desanya Di Pimpin Oleh Seorang Yang Namanya Delupango Lamatenggo, Kemudian Di Lanjutkan Oleh Kepala Desa Yang Ke- 2 Yang Bernama T.Mopili (Ti Botu) ,Kemudian Kepala Desa Yang Ke-3 Bernama Ali Latif (Ti Pentadio), Kepala Desa Ke-4 Bernama Tahir Abas Poneta (Ti Dunito), Kepala Desa Ke 5- Bernama Bagio Olli (Plh) Yaitu Sala Seorang Staf Kantor Camat Yang Di Tunjuk Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Deme Dua, Dan Di Lanjutkan Oleh Kepala Desa Ke-6 Yang Bernama Pano Botutihe ,Di Lanjutkan Oleh Kepala Desa Ke-7 Bernama M.S Nuyi (Plh), Kemudian Kepala Desa Yang Ke-8 Yaitu Bapak Pano Ahute, Di Lanjutkan Oleh Kepala Desa Ke -9 Bapak Said Lamatenggo, Setelah Kepemimpinan Beliau di Lanjutkan Oleh Kepala Desa Ke-10 Yang Bernama Abubakar Janati (Plh), Di Lanjutkan Oleh Bapak S.H Luawo (Plh) Setelah Sekian Lama Menjabat Sebagai Pelaksana Harian Maka S.H Luawao Kembali Menjadi

Kepala Desa Definitif Dan Di Nobatan Menjadi (Ti Pentadio),Setelah Masa Jabatan Maka Desa Deme Dua Di Pimpin Oleh Kepala Desa Yang Ke 13 Yaitu Bapak Kamarudin Bora (Plh).

Kemudian Di Laksanakan Pemilihan Kepala Desa Yang Baru Yaitu Bapak Dj Kasim (Ti Pentadio) Setelah Masa Kepemimpinanya Desa Deme Dua Di Pimpin Kembali Oleh Bapak Kamrudin Bora,Maka Di Adakan Pemilihan Kepala desa Definitive Maka Sebagai Kepala Desa Yakni Bapak Ahyar B Koyo(Ti Ipilo) Yang Menjadi Kepala Desa Selama 5 Tahun, Setelah Masa Jabatan Beliau Berakhir Desa Deme Ii Di Pimpin Oleh Ibu Warni Unusa, Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa . Selanjutnya Kembali Di Laksanakanya Pemilihan Kepala Desa ,Maka Kepala Desa Yang Definitif Yakni Bapak Syamsudin K Ngou.S.H. (Ti Pentadio) Setelah Beliau Mengundurkan Diri Sebagai Kepala Desa Deme Dua Karena Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota Legislatif Maka Pemerintahan Di Lanjutkan Oleh Pelaksana Harian Yakni Ibu Lena Dunggio, Karena Dengan Adanya Peraturan Baru Oleh Bupati Maka Pelaksana Harian Untuk Melanjutkan Tugas Maka Sebagai Pelaksana Tugas Selanjutnya Yaitu Ibu Wiwin Idrus Sebagai Staf Kecamatan Sumalata Timur. Setelah Adanya Peraturan Baru Yang Mana Pemilihan Kepala Desa Bersama Maka Pada Tahun 2016 Di Laksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Maka Terpilih Yang Menjadi Kepala Desa Definitif Yakni Bapak Hendrik Dangkoa, Setelah Tersangkut Kasus Hukum Bapak Hendrik Dangkoa Mengakhiri Masa Jabatannya Sampai Tahun 2019, Setelah Itu Masa Jabatannya Di Lanjutkan Oleh Ade Irma Ismail (Plt),Selama Satu Tahun,Dan Di Lanjutkan Oleh Bapak Fiki Bumulo, Sst. (Plh) Dari Kantor Camat Sumalata Timur Selama Satu Tahun Setelah Masa Jabatannya,Masyarakat Desa Deme Dua Melakukan Pemilihan Antar Waktu (Paw) Dan Di Menengkan Oleh Bapak Yusuf M Talib, (Ti Boungo) Setelah Masa Jabatannya Masyarakat Kembali Melakukan Pemilahan Kepala Desa Definitive Yang Kembali Ke Tangan Bapak Syamsudin K Ngou,S.H. (Ti Bate Tundungio)Sampai Sekarang. Itulah Sekulumit Sejarah Desa Deme Dua Yang Bisa Di Uraikan Di Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa Untuk 6 Tahun.

4.2 Strategi Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kompetensi Paralegal Di Tingkat Desa Untuk Mendukung Akses Keadilan Bagi Masyarakat

Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi paralegal di desa untuk

mendukung akses keadilan bagi masyarakat adalah dengan: Melakukan pelatihan paralegal, Melakukan sosialisasi bantuan hukum, Melakukan evaluasi secara berkala, Mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

Paralegal adalah orang yang memiliki keterampilan hukum, tetapi bukan pengacara. Paralegal berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum.

Peran paralegal di tingkat desa sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, terutama mereka yang kurang mampu. Meskipun demikian, tantangan dalam hal kompetensi dan kualitas masih menjadi hambatan yang signifikan. Untuk meningkatkan kualitas paralegal, berbagai strategi perlu diimplementasikan dengan efektif.

Pertama, pelatihan berbasis kompetensi yang berkelanjutan sangat penting. Yulianti (2023)⁴, "Pelatihan yang berbasis kebutuhan lokal dan masalah hukum spesifik di komunitas lebih efektif dibandingkan pelatihan umum." Pelatihan ini harus mencakup keterampilan hukum dasar, mediasi, dan kemampuan advokasi.

Kedua, penyediaan modul hukum praktis yang relevan akan sangat membantu. Modul ini harus dirancang untuk kasus-kasus yang sering muncul di desa, seperti sengketa tanah dan kekerasan dalam rumah tangga. ICW (2021) mencatat bahwa⁵ "Paralegal yang memiliki akses modul hukum yang spesifik lebih efektif dalam memberikan solusi bagi masyarakat."

Ketiga, penguatan regulasi tentang peran paralegal di desa merupakan langkah yang krusial. Peraturan yang memperjelas status paralegal akan meningkatkan legitimasi mereka. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 adalah dasar hukum yang perlu diperkuat agar pengawasan dan pembinaan lebih efektif.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Platform daring yang menghubungkan paralegal dengan sumber hukum dan pengacara bisa menjadi solusi praktis. "Teknologi dapat mempercepat akses keadilan di wilayah terpencil," menurut Arifin (2022).

Kelima, membentuk jaringan kerja sama antara paralegal, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah desa akan memperkuat dukungan yang mereka terima. Kolaborasi ini dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan keterampilan paralegal.

Secara keseluruhan, implementasi strategi-strategi tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan paralegal di desa, yang pada akhirnya mendukung akses keadilan yang lebih merata. Paralegal juga pada umumnya mendukung profesional hukum lainnya, bekerja di berbagai firma hukum dan organisasi swasta, sektor publik, dan nirlaba. Tugas paralegal biasanya meliputi penyiapan dokumen hukum, penelitian, administrasi, pemberian penawaran kepada klien, wawancara klien dan saksi, pemberian informasi hukum kepada klien, menghadiri pengadilan, dan menangani banyak kasus klien. Ini adalah peran yang sangat beragam di mana Anda akan terjun ke semua aspek industri hukum. Jabatan ini merupakan jabatan penting dalam tim hukum dan terkadang digunakan sebagai persiapan untuk memenuhi syarat sebagai pengacara, karena pekerjaan ini sering kali mencerminkan pekerjaan seorang pengacara magang atau pengacara yang baru saja lulus.

4.3 Mekanisme Pengawasan Dan Pembinaan Yang Dapat Memastikan Integritas Paralegal Dalam Menjalankan Perannya Di Komunitas Desa

Selain peningkatan kompetensi, pengawasan dan pembinaan yang efektif juga menjadi kunci untuk memastikan integritas paralegal dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme yang jelas dan terstruktur harus dirancang agar peran paralegal dapat berjalan sesuai dengan kode etik dan prinsip keadilan.

Pertama, sistem monitoring berbasis komunitas dapat menjadi salah satu mekanisme yang efektif. Masyarakat yang dilayani dapat memberikan umpan balik terkait kinerja paralegal., "Umpan balik langsung dari masyarakat memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan tepat sasaran Suhartono (2020).

Kedua, pembentukan tim supervisi yang terdiri dari pengacara atau lembaga bantuan hukum di tingkat kabupaten dapat membantu paralegal dalam menangani kasus yang kompleks. "Supervisi memberikan perlindungan hukum tambahan bagi paralegal dan masyarakat yang mereka bantu," Nugraha (2021)⁶.

Ketiga, evaluasi berkala melalui pelaporan kegiatan yang transparan juga penting untuk memantau kinerja dan menjaga akuntabilitas. Laporan ini harus mencakup jumlah kasus yang ditangani, jenis layanan yang diberikan, dan hasil penyelesaian kasus.

Keempat, pelaksanaan kode etik paralegal harus ditegakkan secara konsisten.

Kode etik memberikan panduan dalam menjaga profesionalitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. "Penegakan kode etik paralegal memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum," Pranoto (2022)⁷.

Kelima, menyediakan pelatihan khusus tentang integritas dan etika profesional dapat memperkuat kesadaran paralegal terhadap pentingnya menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja.

Pengawasan dan pembinaan yang efektif akan menciptakan paralegal yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi besar bagi akses keadilan di tingkat desa.

Paralegal memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya di komunitas desa yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal. Namun, agar peran tersebut efektif dan terpercaya, penting untuk memastikan integritas para paralegal melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan yang sistematis.

Pengawasan terhadap paralegal dapat dilakukan dengan membentuk lembaga pengawas di tingkat komunitas desa yang bertugas memantau aktivitas paralegal. Lembaga ini dapat terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, aparat desa, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum. Kolaborasi antar pihak ini akan menciptakan pengawasan yang lebih objektif dan partisipatif. Setiap paralegal perlu terdaftar secara resmi pada asosiasi atau lembaga yang berwenang, yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Registrasi ini mencakup verifikasi latar belakang, pelatihan yang telah diikuti, dan komitmen terhadap kode etik profesi paralegal.



Gambar 3. Foto bersama para pemateri dan para peserta pelatihan

Kode etik paralegal harus menjadi pedoman utama dalam menjaga integritas mereka. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip profesionalisme, kerahasiaan, dan larangan menerima gratifikasi atau melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Kepatuhan terhadap kode etik harus diawasi oleh komite disipliner. Menurut Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi (2019)⁸, "Pelanggaran kode etik adalah ancaman serius bagi reputasi dan kepercayaan terhadap paralegal."

Mekanisme pelaporan pelanggaran sangat penting dalam sistem pengawasan. Masyarakat harus diberi akses yang mudah dan aman untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paralegal. Laporan ini perlu ditangani oleh tim investigasi independen untuk memastikan proses yang adil dan tidak memihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Handayani, Febri,(2016)⁹, "Sistem pelaporan yang efektif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat komunitas."

Selain pengawasan, pembinaan juga merupakan aspek krusial. Pembinaan melibatkan pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan paralegal dalam menangani masalah hukum. Program pelatihan ini dapat mencakup studi kasus, simulasi praktik hukum, dan penguatan nilai-nilai etika. Menurut Nugroho (2020)¹⁰, "Pelatihan berkelanjutan meningkatkan kapasitas paralegal dalam memberikan layanan hukum yang

berkualitas."

Pelatihan harus mencakup materi tentang perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, teknik mediasi, serta pemahaman tentang hak asasi manusia dan hukum adat yang berlaku di komunitas setempat. Hal ini penting agar paralegal dapat memberikan pendampingan yang relevan dan efektif.

Mentoring oleh pengacara atau praktisi hukum yang lebih berpengalaman merupakan bentuk pembinaan lainnya. Para mentor dapat membimbing paralegal dalam kasus-kasus sulit serta memberikan masukan untuk meningkatkan profesionalisme dan pengambilan keputusan yang berintegritas. Menurut Rahman (2018), "Mentoring yang baik dapat mempercepat peningkatan kapasitas dan profesionalisme paralegal." Penghargaan terhadap kinerja yang baik juga dapat menjadi motivasi penting bagi paralegal. Program penghargaan dapat mencakup sertifikat penghargaan, pengakuan publik, atau dukungan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Ini mendorong perilaku positif dan meningkatkan motivasi untuk tetap menjaga integritas. Menurut Dewi (2021), "Pengakuan atas prestasi paralegal memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum."



Gambar 4. pemberian penghargaan kepada kedua Desa (Deme Dua dan Bubalango)



Gambar 5. Pemberian materi oleh Bapak Dr. Ibrahim Ahmad, SH.,MH

Penguatan kapasitas lembaga pengawas di tingkat desa juga penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ini dapat meliputi pelatihan tentang teknik audit sosial, pengumpulan bukti, dan penanganan keluhan masyarakat. Menurut Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020)¹¹, "Pelatihan bagi lembaga pengawas meningkatkan efektivitas pengawasan dan daya tanggap terhadap pelanggaran."

Audit berkala terhadap kinerja paralegal oleh lembaga independen atau organisasi non-pemerintah dapat memberikan gambaran yang objektif tentang integritas mereka. Laporan hasil audit ini harus terbuka untuk publik guna meningkatkan akuntabilitas.¹², "Transparansi hasil audit memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan paralegal."

Kolaborasi dengan lembaga hukum formal, seperti kantor bantuan hukum dan lembaga peradilan, perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kerja paralegal diakui dan berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Menurut ILRC, 2019¹³, "Kolaborasi dengan lembaga formal memperluas cakupan dan efektivitas layanan hukum."

Dengan menerapkan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang komprehensif, integritas paralegal dapat terjaga, sehingga mereka mampu memberikan layanan hukum yang adil, profesional, dan berdampak positif bagi masyarakat desa. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran paralegal sebagai penghubung penting dalam sistem peradilan di tingkat komunitas.

5. SIMPULAN

5.1 Kesimpulan :

- a. Paralegal di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung akses keadilan. Namun, tantangan dalam kualitas dan kompetensi memerlukan solusi yang menyeluruh. Strategi pelatihan berkelanjutan, regulasi yang mendukung, dan pemanfaatan teknologi adalah langkah penting untuk memastikan layanan paralegal lebih profesional, berkualitas, dan berintegritas. Paralegal memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan di tingkat desa. Namun, peran

mereka belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan dukungan regulasi. Melalui kolaborasi berbagai pihak, optimalisasi peran paralegal di desa dapat terwujud, mendukung keadilan yang lebih merata dan inklusif.

- b. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas paralegal dalam menjalankan peran mereka di komunitas desa. Sistem pengawasan berbasis umpan balik masyarakat, supervisi oleh lembaga bantuan hukum, pelaporan berkala, penegakan kode etik, serta Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil dari kegiatan pengabdian. Simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan program pengabdian selanjutnya. Pelatihan tentang integritas dan etika profesional merupakan elemen yang harus diterapkan. Dengan mekanisme ini, paralegal dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung tercapainya akses keadilan yang merata. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat.

5.2 Saran :

- a. Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum diharapkan menyediakan sumber daya dan pelatihan rutin untuk paralegal, Masyarakat dan Aparat Desa perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran paralegal dan mendukung mereka dalam menjalankan tugas, serta Pengembangan Sistem Monitoring berbasis teknologi harus diprioritaskan untuk memperluas akses informasi dan pengawasan kinerja paralegal.
- b. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum harus membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi kinerja paralegal, Masyarakat perlu diberdayakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif terkait kinerja paralegal guna menciptakan pengawasan yang partisipatif, Supervisi yang dilakukan oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum harus lebih intensif, terutama untuk kasus-kasus yang rumit dan berisiko tinggi, Pelatihan berkala harus mencakup materi yang menekankan pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab moral dalam memberikan layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi, 2019, Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum, ILRC
- Arifin, Muhammad. (2022). Akses Keadilan Berbasis Teknologi. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- ICW. (2021). Laporan Tahunan: Meningkatkan Kapasitas Paralegal. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- ICW. 2021. Laporan Survei Keadilan Sosial. Jakarta
- ILRC, 2019, Paralegal Bukan Parabegal: Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum, Jakarta
- Iskandar, Abdul Halim. 2022. Kebijakan Desa Berbasis Hukum. Jakarta: Kementerian Desa
- Laoly, Yasonna. 2020. Meningkatkan Akses Hukum di Wilayah Pedesaan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- LBH Jakarta, 2010, Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik Dan Standart Operasional Prosedur, LBH Jakarta, Jakarta
- LBH Jakarta. 2022. Laporan Tahunan: Peran Paralegal di Akar Rumput. Jakarta
- Nugraha, Andi. (2021). Pengawasan dan Supervisi Paralegal. Bandung: Universitas Hukum Rakyat.
- Pranoto, Dwi. (2022). Kode Etik dan Integritas Paralegal. Surabaya: Pustaka Etika Hukum.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298
- Putusan MK No. 88/PUU-XII/2014

- Suharto. 2021. Wawancara dalam Peningkatan Layanan Hukum di Desa Sukamaju. Jakarta: Yayasan Hukum Desa
- Suhartono, Budi. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Monitoring Paralegal. Jakarta: Keadilan Sosial Press.
- Susanti, Dewi. 2020. Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas. Bandung: Lembaga Kajian Hukum Indonesia
- Tumpa, Harifin A. 2017. Etika Hukum dan Tantangan di Pedesaan. Bandung: Penerbit Hukum Indonesia
- Usman, Anwar. 2021. Penguatan Akses Hukum melalui Paralegal. Yogyakarta: YLBHI
- UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Widodo, Joko. 2020. Pidato Kenegaraan 2020, Jakarta
- Yulianti, Sri. (2023). Paralegal dan Akses Keadilan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Hukum Nasional.